

Ribuan Pelaku Wisata Labuan Bajo Mogok, Minta Jokowi Batalkan Kenaikan Tiket

LABUAN BAJO (IM)- Ribuan pelaku pariwisata di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), NTT melakukan aksi mogok kerja tidak beraktivitas mengantar wisatawan baik di darat maupun di laut selama sebulan penuh.

Mereka menuntut dan meminta Presiden Jokowi membatalkan kenaikan tiket masuk ke Taman Nasional (TN) Komodo. Selama aksi mogok kerja ini, para pelaku wisata bersamasama membersihkan sampah di seluruh kota Labuan Bajo, selama sebulan penuh.

Aksi kerja bakti sosial ini bagian dari reaksi protes keras ribuan pelaku wisata yang sebelumnya dituding melakukan aksi anarkis dan sweeping. Mogok kerja dimulai hari ini, Senin (1/8) dimulai dengan memungut sampah di puncak Waringin, Dermaga Water front City, Kampung Air dan ruas jalan kota.

Beberapa hari kedepan dan nantinya akan berlangsung pemungutan sampah di hari ke berikutnya pada kantor-kantor dinas badan seperti Kantor Bupati, DPRD dan kantor balai Taman Nasional Komodo (BTNK). Demikian surat pemberitahuan aksi pelaku pariwisata ke Polres Manggarai Barat. Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Cabang Kabupaten Mabar, Sebastian Pandang, Senin (1/8).

Mereka menyatakan cinta damai dan mencintai lingkungan tidak terbiasa melakukan tindakan anarkis. Para pelaku wisata lebih mengedepankan keharmonisan di kota pariwisata super premium. "Seluruh elemen pelaku wisata lebih mengedepankan kenyamanan dan Kedamaian. Aksi mogok ini merupakan puncak dari reaksi protes tolak kenaikan tarif masuk ke Pulau Komodo dan pulau Padar sebesar Rp3,75 juta," katanya.

Karena itu, jelas Sebastian Pandang, pelaku wisata lebih menunjukkan kepada publik pembersihan sampah-sampah di kota Labuan Bajo. Hal ini juga bagian dari protes, sehingga terbebas dari polusi dan pencemaran lain akibat sampah.

Ketua Forum Masyarakat Penyelamat Pariwisata Manggarai Barat (Formapp) Rafael T. TodoWela mengaskan aksi boikot di hari pertama semua element pelaku pariwisata memulai pembersihan sampah sepanjang ruas jalan kota, tempat strategis seperti water front city, kampung air kemiri, kantor kantor di hari berikutnya.

"Kegiatan aksi boikot ini dilakukan selama sebulan penuh. Ini juga bagian dari bagaimana pelaku wisata sebagai anak bangsa dalam menyambut kemerdekaan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia," katanya. ● pra

UNTUK MAKAN SEHARI-HARI

Bocah Perempuan di Tangerang Rela Jadi Manusia Silver

TANGERANG (IM)- Tak seperti anak-anak pada umumnya, Kirana bocah berusia 6 tahun ini harus merasakan pahitnya hidup di jalanan. Ia bersama sang ibu, rela menjadi manusia silver untuk mencari sesuap nasi.

Kirana, yang selalu diajak oleh ibunya menjadi manusia silver di lampu merah Citra Raya, Cikupa, Kabupaten Tangerang harus menahan panasnya terik matahari. Di mana, tubuh mungilnya dilumuri cat warna silver, mulai dari ujung rambut sampai kuku kaki.

Kirana seperti tak takut tersambar oleh mobil besar seperti truk muatan barang yang kerap melintas di jalan raya tempatnya mengais rezeki.

"Ga takut. Kan aku cuma di atas (pembatas jalan) ga kebawah, kata mama juga harus hati-hati," katanya, Senin (1/8).

Sementara itu, Marni, ibu dari Kirana mengaku terpaksa mengajak anak semata wayangnya tersebut lantaran desakan ekonomi. "Terpaksa saya ajak. Dia tidak ada yang jaga di rumah. Ayahnyanya juga kerja ngamen," ungkapnya.

Marni mengatakan, dirinya sudah mengajak Kirana menjadi manusia silver di lampu merah sejak satu tahun lalu. Ia juga mengaku tidak khawatir dengan

Kirana yang kerap mondar-mandir di atas pembatas jalan.

"Udah setahun dia (Kirana) diajak. Sejak awal dia juga tidak pernah protes jika saya lumuri cat silver. Sudah saya ajarkan juga dia tidak boleh turun ke jalan jika lampu sudah berwarna hijau, kan banyak truk yang lewat," katanya.

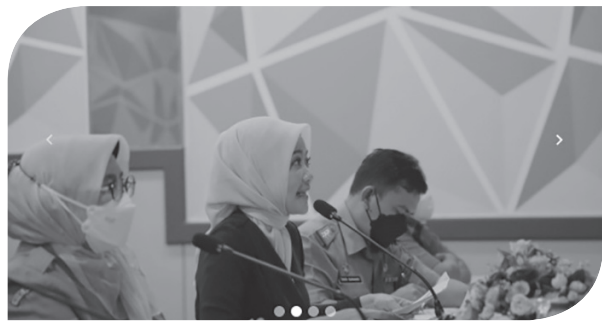
Marni menceritakan, awal mula ia tidak pernah membawa anaknya untuk bekerja. Namun setahun yang lalu mertua yang menjaga Kirana meninggal karena Covid-19.

"Awalnya saya takut anak saya kultunya rusak kena cat. Tapi keadaan maksa saya buat seperti itu. Tapi kalau jadi manusia silver cuma Sabtu-Minggu aja," ungkapnya.

Saat ini, dirinya bersama suami dan anaknya tinggal di sebuah kontrakan kecil daerah Bitung, Kabupaten Tangerang. "Satu kontrakan kecil isinya 8 orang termasuk keluarga saya," terangnya.

Dalam sehari menjadi manusia silver di Lampu Merah Citra Raya, lanjut Marni dirinya dan sang anak bisa mendapatkan uang Rp200 ribu. "Dulu (Sebelum ajak anak) dapat Rp100 ribuan. Tapi pas Kirana ikut jadi sehari dapat Rp200 ribu. Mungkin karena kasian sama Kirana," pungkasnya. ● pp

Disdik Jawa Barat Dorong dan Dukung Bulan Imunisasi Anak Nasional 2022



Kadisdik Barat sekaligus Ketua Pokja BIAN Jabar, Dedi Supandi dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan BIAN 2022 di Command Center Tikomdik Disdik Jabar, Kota Bandung, Senin (1/8).

BANDUNG (IM)- Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat (Jabar) mendukung penuh program Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) Tahun 2022 yang diselenggarakan mulai Agustus-September 2022.

Bulan Imunisasi Anak Nasional ini bertujuan menciptakan generasi emas 20-30 tahun kedepan, di mana anak-anak Jawa Barat tumbuh menjadi anak yang lebih kuat, sehat, dan pintar. Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jawa Barat (Barat) sekaligus Ketua Pokja BIAN Jabar, Dedi Supandi pun mendorong untuk menentukan target terkait pelaksanaan BIAN ini.

"Pertama, ketahui target (tentukan jumlah imunisasi, lokasi, dan petugas)," tuturnya dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan BIAN 2022 di Command Center Tikomdik Disdik Jabar, Jln. Dr. Radjiman No. 6, Kota Bandung, Senin (1/8).

Kedua, lanjutnya, pada 3 Agustus 2022 akan diadakan kick off kegiatan ini. "Setelah 7 hari pelaksanaan, kita akan mengevaluasi laporan harian, berupa target yang telah ditentukan," ujarnya.

Terakhir, Kadisdik berharap, Disdik kabupaten/kota membuka konsep-konsep (inovasi) yang membuat anak-anak senang. "Misalnya, saat

melaksanakan imunisasi, anak-anak mengenakan pakaian yang sesuai cita-cita mereka, seperti polisi atau dokter. Ini akan menjadi hal unik (kreativitas)," ucapnya.

Sementara itu, Bunda PAUD Jabar, Atalia Praratya mengaku sudah siap terkait pelaksanaan BIAN ini. "Kegiatan BIAN sudah mulai dilakukan. Kalau bersama-sama, kita pasti bisa. Kita juga membutuhkan simbol, namanya Kapten BIAN, supaya anak-anak senang," ujarnya.

Atalia berharap, Bunda PAUD hadir menjadi pendorong di berbagai elemen masyarakat, termasuk di posyandu atau tempat imunisasi diselenggarakan. "Karena, bagaimanapun kita memiliki target yang sangat besar, kalau dikerjakan sendiri tidak mungkin. Maka, kita membutuhkan dukungan dari berbagai pihak," ungkapnya.

Yang penting, menurutnya, target tercapai dan anak-anak terlindungi dari berbagai macam penyakit. "Jadi, sekali lagi selamat bergerilya!" serunya.

Rapat koordinasi BIAN ini dihadiri pula oleh Asisten Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Sosial Setda Pemprov Jabar, Dewi Sartika, Dinas Kesehatan Jabar, PKK, dan lain-lain. ● lys

8 | Nusantara



IDN/ANTARA

PENGIRIMAN PESAWAT PTDI KE THAILAND

Tim Pilot dan kru memeriksa kesiapan pesawat terbang NC212i buatan PT. Dirgantara Indonesia (PTDI) sebelum penerbangan khusus pengiriman pesawat (ferry flight) ke Thailand melalui Bandara Husein Sastranegara di Hanggar Delivery Center PTDI, Bandung, Jawa Barat, Senin (1/8). PTDI mengirimkan satu unit pesawat NC212i dengan sistem konfigurasi "troop transport" yang sesuai dengan kondisi geografis negara Thailand yang rencananya digunakan oleh Departement of Royal Rainmaking and Agricultural Aviation (DRRAA) Thailand untuk bidang pertanian.

Kota Bogor Target Perluas Ruang Terbuka Hijau

Rencananya, tahun 2023 dan 2024 Disperumkim akan melakukan beberapa land banking untuk pembuatan taman kampung di lokasi perumahan tidak tertata. Selain itu ada beberapa program lainnya seperti mengembalikan fungsi lahan yang tadinya PKL menjadi taman atau ruang terbuka publik.

BOGOR (IM)-Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor mencatat jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik Kota Bogor mencapai 468,18 hektare hingga 2021, di mana 9,7 persen di antaranya dikelola Disperumkim Kota Bogor. Setiap tahun, Pemerintah

Kota (Pemkot) Bogor melalui Disperumkim menargetkan penambahan RTH sebesar 0,8 hektare.

Kepala Bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Disperumkim Kota Bogor, Irfan Zacky, menjelaskan capaian RTH pada lahan yang dikelola oleh Disperumkim

hingga 2021 sudah mencapai 9,7 persen atau sekitar 45,84 Hektare.

RTH tersebut, disebutkan Irfan, mencakup tujuh taman besar, lapangan, Kebun Raya, hutan penelitian Cifor, bantaran sungai, bantaran kali, dan taman-taman kecil. Mengenai target penambahan RTH per tahun, pihaknya menargetkan 0,8 hektare atau sekitar 8.000 meter persegi setiap tahun.

Meski target yang ditetapkan berada di bawah satu persen, Irfan mengklaim realisasi setiap tahunnya sudah melebihi dari target yang ditentukan. Misalnya seperti pada pembuatan Taman Manunggal di Jalan Manunggal, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.

"Tahun kemarin saja dari target 0,8 hektare kita sudah hampir 2 hektare. Nah tahun

ini pun dari target 0,8 hektare lebih. Taman Manunggal saja satu hektare dan yang lain-lain sekitar 1,5 hektare. Jadi setiap tahun target kita sih melebihi capaian kita yang target yang disepakati," katanya, Senin (1/8).

Ia meyakini, capaian RTH di Kota Bogor akan terus bertambah. Sebab, ada beberapa proyek pembangunan RTH yang belum masuk dalam akumulasi luar RTH secara keseluruhan.

Di samping itu, untuk menambah capaian RTH, Irfan mengatakan Disperumkim Kota Bogor sudah menyiapkan beberapa skema misalnya dengan membeli lahan, hingga membuat taman di perkampungan.

"Rencananya tahun 2023 dan 2024 kami akan coba melakukan beberapa land banking untuk pembuatan

taman kampung di lokasi perumahan tidak tertata. Itu salah satu program kami, selain beberapa program lainnya seperti mengembalikan fungsi lahan yang tadinya PKL menjadi taman atau ruang terbuka publik," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Bapempera DPRD Kota Bogor, Endah Purwanti, menyoal program selama setahun, Pemkot Bogor hanya menggariskan 1 persen penambahan RTH di Kota Bogor.

"Tipologi RTH ini cukup penting untuk menunjang pelaksanaan Perda RTH ini, sehingga kami untuk disegerakan pembuatan review dan kajiannya," kata Endah. ● gio

Camat Dorong Percepat Pembangunan RSUD Tigaraksa

TANGERANG (IM)- Camat Tigaraksa, Hj. Rahyuni memastikan aspirasi dan dukungan beberapa elemen masyarakat akan pembangunan RSUD Tigaraksa segera ditindaklanjuti dan disampaikan kepada bupati Tangerang.

Hal itu diungkapkan Hj Rahyuni usai menerima Barisan Perjuangan Barisan Perjuangan Rakyat Jelata (BARATA) yang melakukan audiensi dan diskusi terkait hal tersebut pada Senin, (1/8). Menurut Camat, tidak ada alasan baginya untuk tidak menindaklanjuti apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat, terlebih menyangkut hak dasar masyarakat yakni kesehatan.

"Sudah pasti kami akan sampaikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, karena pelayanan kesehatan dan pendidikan adalah hak dasar masyarakat kabupaten Tangerang yang memang harus dipenuhi," ungkap Camat.

Menurut dia, aspirasi akan pelayanan kesehatan sudah masuk ke dalam program dari Bupati Tangerang, sehingga masyarakat tidak lagi perlu khawatir akan pelayanan tersebut. "Dari sekian banyaknya program Bapak Bupati, pemerintahan pelayanan kesehatan menjadi hal yang menjadi prioritas utama, beberapa di antaranya RSUD Balara, RSUD Pakuhaji dan RSUD Tangerang, dan insya Allah dalam waktu dekat ini pem-

angunan tahap awal pembangunan RSUD Tigaraksa sudah akan dimulai," ungkapnya.

Diutarakan Camat, proses pembangunan RSUD saat ini menjadi prioritas utama pemerintah kabupaten Tangerang dan telah melalui tahapan proses administrasi dan legalitas jelas, sehingga proses lelang pekerjaan yang saat ini tengah digelar dipastikan aman.

"Memang betul saat ini ada beberapa warga sekitar yang menolak lantaran ini dan itu, tapi kami memastikan kajian kajian yang harus dipenuhi sudah ditempuh oleh orang-orang yang berkompeten dibidangnya sehingga insya Allah akan berdampak baik bagi masyarakat sekitar," jelasnya.

H. Saleh Harahap Koordinator Barisan Perjuangan Rakyat Jelata Provinsi Banten menuturkan saat ini masyarakat di beberapa kecamatan di ibukota kabupaten Tangerang kesulitan untuk mengakses pelayanan kesehatan.

Berdasarkan catatan yang dia punya, tidak sedikit dari masyarakat yang terpaksa harus merenggang nyawa saat menuju fasilitas kesehatan yang jaraknya tidak dekat. "Kami berterimakasih atas komitmen yang kita buat pada hari ini, ini adalah ikhtiar kita bersama dalam mempermudah masyarakat khususnya warga miskin untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang opti-

mal," ungkap H. Saleh.

Selain itu, persoalan kehabisan kamar, melahirkannya di jalan atau mati di ambulans, sudah menjadi kekhawatiran yang menakutkan bagi masyarakat di lima kecamatan yang saat ini tengah mendambakan pembangunan sarana kesehatan.

"Sudah sepatutnya kita dorong pembangunan RSUD tigaraksa, dan bu Camat insya Allah komit dengan apa yang kita telah sepakati bersama," tandasnya.

Untuk diketahui, Rencana Pemerintah Kabupaten Tangerang yang dalam waktu dekat akan memulai proses pembangunan RSUD di Tigaraksa, mendapat dukungan dari berbagai kalangan.

Pembangunan rumah sakit di atas Lahan seluas 4,9 hektare di Kampung Pabuaran, Tigaraksa, Tangerang, Banten, yang akan dijadikan sebagai lokasi pembangunan RSUD Tigaraksa diharapkan nantinya dapat melayani masyarakat di delapan kecamatan, yaitu Kecamatan Tigaraksa, Solor, Cisoka, Cikupa, Panongan, Curug, Jambé dan Legok

"Pembangunan RSUD Tigaraksa diharapkan bisa mengkomodir layanan kesehatan khususnya bagi 1,5 juta penduduk di delapan kecamatan terdekat," Ungkap H. Saleh Harahap, Koordinator Barisan Perjuangan Rakyat Jelata (BARATA) kepada wartawan. ● joh



Camat Tigaraksa, Hj. Rahyuni mendorong percepatan pembangunan RSUD Tigaraksa Kabupaten Tangerang.

Kondisi Puskesmas Tamblong di Kota Bandung Memprihatinkan

BANDUNG (IM)- Puskesmas Tamblong yang terletak di Kota Bandung Jawa Barat (Jabar), tidak bisa memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat, akibat terkendala sarana fasilitas yang kurang layak. Berdiri di atas lahan 1.000 meter dan beroperasi di bangunan heritage atau cagar budaya kelas A Kota Bandung, yang dibangun pada tahun 1925, membuat Pemkot Bandung kesulitan untuk dapat melakukan renovasi atau perbaikan bagian bangunan yang mulai rusak di makan usia.

Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan mengatakan, bahwa Puskesmas Tamblong sudah beroperasi di bangunan heritage tersebut sejak 1980-an. Kondisinya seperti yang dilihat bangunan sudah memprihatinkan dan tidak bisa sembarang diperbaiki, karena ini bangunan heritage kelas A, sehingga diperlukan persetujuan dari pihak terkait untuk dapat melakukan perbaikan.

"Padahal secara fungsi, Puskesmas Tamblong ini berada di pusat kota yang kehadiran heritage untuk memfasilitasi layanan kesehatan masyarakat yang ada di tiga kelurahan yaitu, Kelurahan Merdeka, Braga dan Kebon Pisang," ujarnya.

Maka dari itu, Tedy mendorong agar Pemkot Bandung untuk dapat mencari solusi terbaik, salah satunya relokasi, agar pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang merupakan layanan kebutuhan wajib dasar, dapat tetap dilaksanakan secara baik. Meski nanti dilakukan relokasi, menurutnya lokasi Puskesmas Tamblong harus tetap berada di wilayah kerjanya, untuk tetap melayani kebutuhan masyarakat. "Kalau potensi relokasi

sepertinya harus dilakukan, karena memang bangunan ini tidak bisa kita perbaiki sembarang. Jadi kalau ada potensi peluang pindah dari Puskesmas ini, kenapa tidak," terangnya.

Selain itu, kalau dilihat dari estetika, bangunan ini seperti lebih cocok untuk heritage atau cagar budaya kelas A Kota Bandung, yang dibangun pada tahun 1925, membuat Pemkot Bandung kesulitan untuk dapat melakukan renovasi atau perbaikan bagian bangunan yang mulai rusak di makan usia.

Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan mengatakan, bahwa Puskesmas Tamblong sudah beroperasi di bangunan heritage tersebut sejak 1980-an. Kondisinya seperti yang dilihat bangunan sudah memprihatinkan dan tidak bisa sembarang diperbaiki, karena ini bangunan heritage kelas A, sehingga diperlukan persetujuan dari pihak terkait untuk dapat melakukan perbaikan.

"Padahal secara fungsi, Puskesmas Tamblong ini berada di pusat kota yang kehadiran heritage untuk memfasilitasi layanan kesehatan masyarakat yang ada di tiga kelurahan yaitu, Kelurahan Merdeka, Braga dan Kebon Pisang," ujarnya.

Maka dari itu, Tedy mendorong agar Pemkot Bandung untuk dapat mencari solusi terbaik, salah satunya relokasi, agar pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang merupakan layanan kebutuhan wajib dasar, dapat tetap dilaksanakan secara baik. Meski nanti dilakukan relokasi, menurutnya lokasi Puskesmas Tamblong harus tetap berada di wilayah kerjanya, untuk tetap melayani kebutuhan masyarakat. "Kalau potensi relokasi

PENGUMUMAN PELAKSANAAN PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF ('KIK') DAN PROSPEKTUS REKSA DANA SYAILENDRA DANA EKUITAS PLUS

Menindaklanjuti rencana perubahan KIK dan Prospektus REKSA DANA SYAILENDRA DANA EKUITAS PLUS yang telah diumumkan melalui surat kabar harian "International Media" tertanggal 20 Januari 2022, kami, PT Syailendra Capital selaku Manajer Investasi dari REKSA DANA SYAILENDRA DANA EKUITAS PLUS, dengan ini bermaksud menyampaikan pelaksanaan perubahan Kontrak Investasi Kolektif ('KIK') dan Prospektus REKSA DANA SYAILENDRA DANA EKUITAS PLUS sebagaimana termaktub dalam akta Addendum REKSA DANA SYAILENDRA DANA EKUITAS PLUS.

Rincian perubahan ketentuan dalam KIK dan Prospektus tersebut di atas dapat diperoleh di Manajer Investasi.

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA DANA EKUITAS PLUS serta pihak-pihak yang berkepentingan.

SYAILENDRA

Jakarta, 2 Agustus 2022

Manajer Investasi
REKSA DANA SYAILENDRA DANA EKUITAS PLUS
PT Syailendra Capital
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan